

Isu-Isu Identitas Budaya Nasional dalam Film “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck”

Amirah Anis Thalib

Kajian Sastra dan Budaya, Universitas Airlangga
miathalib.mt@gmail.com

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang dengan kompleksitasnya menjadikannya multikultur. Kondisi ini mempengaruhi tema-tema yang dimunculkan dalam film yang merepresentasi dan merekonstruksi kenyataan. “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” merupakan film percintaan yang dibumbui isu-isu multikultur khususnya terkait dengan identitas budaya yang meluas kedalam ranah suku, ras, agama, dan kelas sosial di Indonesia, khususnya Minang. Tulisan ini menggunakan pendekatan multikulturalisme Will Kymlicka untuk menginterpretasi dan memaknai temuan-temuan data. Penulis menemukan bahwa identitas suku dan kelas sosial yang menjadi isu-isu multikulturalisme yang dikomunikasikan dalam film ini, sekaligus pemicu timbulnya konflik dalam film. Hasil analisis lain menunjukkan ikatan primordial dan etnosentrisme merupakan penghambat multikulturalisme dalam konteks Indonesia yang dikomunikasikan dalam film ini.

Kata kunci: film, multikulturalisme, Indonesia, primordial, etnosentrisme.

Abstract

Indonesia is a country with complexities that makes it multicultural. Such condition affects themes which is emerged in some movie that represents and reconstructs reality. “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” is a movie with love story line that brings multicultural issues related with cultural identity which broaden into field of ethnicity, race, religion, and social class in Indonesia, especially Minang. This paper uses multiculturalism approach by Will Kymlicka to interprets and signifies the findings. The writer finds tha ethnicity and social class identity which is also multiculturalism issues are communicated in this film, it also the trigger of conflicts in the film. The other analysis shows that primordialism and ethnocentrism are the obstructor of multiculturalism in Indonesian context which is communicated through this film.

Key words: film, multiculturalism, Indonesia, primordial, ethnocentrism.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dalam segi budaya, etnis, bahasa, serta mental sangat beragam. Sebagaimana dinyatakan oleh Geertz, bahwa keragaman etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali, dan seterusnya) serta pengaruh mental-mental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya) yang bertarung untuk menanamkan pengaruhnya masing-masing membuat negara ini kompleks, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis (Kymlicka 2002: viii). Kondisi yang multikultur ini tidak serta-merta dapat berjalan berdampingan dengan harmonis. Sebagai contoh sering kita jumpai pemberitaan mengenai konflik antar suku, agama, serta gerakan separatisme yang terjadi di negara ini. Isu-isu yang berkaitan dengan perbedaan identitas budaya di Indonesia cukup mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaannya sebagai isu utama maupun isu pelengkap dalam film-film Indonesia.

Film “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck” merupakan film adaptasi dari novel karya HAMKA dengan judul yang sama. Tema utama film ini adalah percintaan dengan bumbu isu identitas budaya yang juga merupakan isu utama yang sekaligus merupakan penyebab konflik dalam film. Dikisahkan bahwa Zainudin, seorang pemuda dengan kondisi melarat yang lahir dari ibu berdarah Bugis dan bapak berdarah Minang yang pergi ke kampung halaman bapaknya, Padang Panjang. Disana dia bertemu dengan Hayati, seorang gadis Minang dari keluarga terpandang, dan mereka saling jatuh cinta. Akan tetapi, masyarakat Minang menganggap Zainudin bukan bagian dari mereka karena ibunya bukan orang Minang.

Zainudin yang terlanjur jatuh cinta pada Hayati akhirnya melamarnya, tapi keluarga Hayati menolaknya. Hayati pun pada akhirnya dijodohkan dengan Aziz yang dianggap lelaki Minang tulen yang kaya raya. Merasa kecewa, Zainudin kemudian merantau bersama Bang Muluk ke Batavia. Disana dia memulai karir sebagai penulis. Singkat cerita, dia menjadi penulis terkenal. Dipopularitas dan kemakmurannya, Zainudin bertemu Hayati dan suaminya, Aziz, dalam kondisi perekonomian yang tidak baik. Zainudin yang menganggap mereka sebagai sahabat bersedia untuk membantu meringankan beban perekonomian mereka. Namun kemudian Aziz menceraikan Hayati karena merasa tidak mampu lagi menafkahnya. Hayati sendiri tetap tinggal di rumah Zainudin. Akibat suatu perdebatan, Zainudin memulangkan Hayati ke kampung halaman dengan menyuruhnya menumpang kapal Van der Wick yang karam di tengah perjalanan. Sebelum Hayati meninggal di sebuah Rumah Sakit mereka mengaku jika masih saling mencintai. Akan menarik apabila film ini dilihat dari perpektif multikulturalisme untuk menjelaskan kompleksitas identitas budaya nasional dalam film Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dan sejauh mana isu-isu tersebut terkait dengan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Film merupakan salah satu media yang cukup mendapat perhatian serta berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sehingga dewasa ini film bukan hanya seni yang menghibur, tapi juga suatu praktek sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hansen dan Stacey (Turner 1999: 139), “*film does not only happen in the cinema, it is a social practice that affects everyday lives through fandom, gossip, fashion, and the whole range of activities*

through which cultural identities are formed.” Mereka menekankan bahwa setelah selesai ditonton di gedung bioskop film (terutama film-film populer) belum berakhir. Film menjadi praktek sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari melalui fandom, gosip, fashion, dan seluruh aktifitas yang terkait dengan pembentukan identitas kebudayaan.

Mengenai hubungannya dengan budaya, ada asumsi bahwa terdapat refleksi antara film dan masyarakat. Sehingga film dilihat sebagai sebuah refleksi dari kepercayaan dominan dari sebuah budaya (Turner 1999: 152). Akan tetapi muncul pandangan alternatif pada pendapat sebelumnya dari struktural linguistik, struktural antropologi, teori sastra, dan teori marxian tentang ideologi bahwa,

“Film does not reflect or even record reality; like any other medium of representation it constructs and ‘represents’ its pictures of reality by way of the codes, conventions, myths, and ideologies of its culture as well as by way of the specific signifying practices of the medium” (Ibid).

Hal yang dilakukan oleh film bukan merefleksikan atau merekam realitas seperti yang dikatakan kebanyakan orang. Film merupakan salah satu media representasi yang merepresentasikan dan mengkonstruksi berbagai gambaran realita di dalamnya melalui kode-kode, konvensi-konvensi, mitos-mitos, dan ideologi dari budaya tertentu sebagai medium praktek pemaknaan.

Jika berbicara tentang industri film, Hollywood merupakan nama yang cukup berpengaruh karena kesuksesannya dalam mendominasi sinema dunia sehingga dalam sejarah kebudayaan, film menjadi salah satu reflektor atau indeks pergerakan dalam budaya populer abad ke dua puluh (Turner 1999:2). Keunggulan film Hollywood adalah,

“Film-film memiliki sebuah permukaan realisme yang cenderung menyamarkan fantasi dan membuatnya terlihat nyata. Permukaan realisme ini telah berkembang kokoh sejak masa film senyap (tanpa suara) hingga film warna yang telah dilengkapi suara saat ini. Kualitas dari kenyataan yang ditampilkanlah yang membuat pelarian kedalam dunia film sangat kuat, sehingga mengakibatkan penyerapan baik sadar maupun tak sadar terhadap nilai-nilai serta gagasan yang ditampilkan.” (Powdermaker 1950)

Pengaruh dari formula Hollywood yang turun-temurun menyajikan berbagai fantasi dalam film kiranya membuat penontonnya benar-benar terpengaruh. Akan tetapi, beberapa penonton yang cukup kritis tentu akan melihat fantasi-fantasi yang disuguhkan hanya sebagai alat politik dan propaganda (Ismail 1983: 48) yang ditargetkan pada penduduk dunia untuk mempromosikan *American way of life*..

Akan cukup berbeda jika kita menengok pada film-film Indonesia, film Indonesia belum mampu menaklukkan alam pikiran dan perasaan para penontonnya. Hal ini terjadi bukan hanya karena dominasi film-film impor yang masuk ke Indonesia, tapi juga inferioritas yang masih ada pada bangsa Indonesia. Terlepas dari masalah ini, perfilman Indonesia tetap berjalan meskipun sempat mengalami keterpurukan akibat ketidak-stabilan politik era 1960-an (Ismail 1983).

Mengacu pada pendapat Geertz sebelumnya, terlintas bahwa Indonesia secara budaya sangatlah beragam atau multikultur. Akan tetapi hal ini tidak serta merta membuat multikulturalisme menjadi politik yang diadopsi di Indonesia. Mengacu pada hipotesa P. Laslett (1982), “masyarakat negara ini amat majemuk dengan pandangan pluralismenya karena keanekaragaman masyarakat dan budayanya, yang pada masa lampau kurang

berinteraksi satu sama lain karena faktor geografis kepulauan”. Berbeda dengan pluralisme yang memandang kebudayaan sebagai entitas distinktif, multikulturalisme cenderung menekankan bahwa relasi antar kebudayaan dengan anggapan bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan kebudayaan lainnya (Syarifuddin 2006: 4-5).

Keragaman yang ada, dalam hal ini di Indonesia khususnya, menurut Kymlicka (2003: 13-14) disebabkan oleh dua pola besar, yaitu masuknya budaya ke dalam negara yang lebih besar, dimana ada usaha dari minoritas bangsa untuk mempertahankan diri dan menuntut otonomi untuk memastikan keberlangsungannya sebagai masyarakat sendiri; serta imigrasi perorangan atau keluarga yang tergabung dalam ‘kelompok etnis’ dimana mereka ingin mengubah institusi dan undang-undang masyarakat untuk lebih menerima perbedaan kebudayaan.

Istilah multikulturalisme dijelaskan oleh Kymlicka sebagai kebijakan yang mengakomodasi polietnisitas, bahkan lebih luas lagi kelompok minoritas baik etnis maupun non-etnis yang karena berbagai alasan, dikucilkan atau dikesampingkan dari aliran utama masyarakat (2003: 25). Dalam *Kewarganegaraan Multikultural*, Kymlicka menawarkan upaya untuk meng”handle” masyarakat asli yang dijelaskan sebagai minoritas melalui upaya untuk mengakomodasi perbedaan kebangsaan dan etnis melalui hak perorangan dan kolektif. Penjelasan mengenai hak perorangan untuk masyarakat asli tidak diungkapkan secara tegas, akan tetapi saya akan merujuk pada pandangan liberal mengenai kebebasan dan kesetaraan perseorangan seperti hak dasar sipil dan politik untuk semua orang

(Kymlicka: 2002: 50). Sementara itu, hak kolektif memiliki tiga bentuk yaitu, (1) hak atas pemerintahannya sendiri; (2) hak-hak polietnis; dan (3) hak-hak perwakilan khusus (Ibid, 39).

METODE

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskripsi mengenai subyek yang diteliti (Suyanto & Sutinah 2005). Deskripsi yang dihasilkan diharap dapat menjelaskan secara dalam tentang kompleksitas identitas budaya nasional yang dikomunikasikan dalam film “Tenggelamnya Kapal Van der Wijck”. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah penelaahan dokumen, yang mana data yang diperoleh berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan dokumen (Oetomo, dalam Suyanto & Sutinah, 2005: 186). Selanjutnya, teknik analisis induktif yang mendasarkan pada prodesur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum (Hendarso dalam Suyanto & Sutinah, 2005: 169) digunakan sebagai teknik analisis data. Sudut pandang multikulturalisme digunakan untuk menjelaskan dan memaknai pola-pola yang ditemukan dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu-isu kompleksitas identitas budaya nasional yang ditampilkan dalam film *Tenggelamnya Kapal Van der Wick* dekat dengan multikulturalisme seperti perbedaan suku dan kelas sosial yang merupakan salah satu penyebab konflik baik dalam film maupun dalam konteks masyarakat Indonesia. Akan tetapi perbedaan suku merupakan permasalahan utama yang dimunculkan dalam film ini. Berikut akan ditampilkan hasil temuan

tentang perbedaan suku dan kelas sosial serta kaitannya dengan multikulturalisme dalam konteks Indonesia.

Perbedaan Suku

Zainudin merupakan keturunan Minang-Bugis yang tidak mendapatkan pengakuan atas identitas kesukumannya. Karena ketika di Batipuh dia dianggap orang Bugis, bahkan cenderung dianggap tidak memiliki suku. Sedangkan Hayati merupakan suku Minang dari kalangan terpendang. Tidak diakuiinya identitas kesukuan Zainudin merupakan pengaruh sistem matrilineal yang timbung dalam masyarakat Minang. Sebagaimana dinyatakan oleh Stark dalam tulisannya yang berjudul *The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective*, bahwa, “*The life in the core areas was defined by a matrilineal way of life. This means there are certain kinship groups which follow the female descent of a mother.*” (Stark 2013: 2).

Konflik mulai muncul ketika dalam kehidupannya sebagai individu tanpa identitas kesukuan, Zainudin kerap terdiskriminasi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pergunjungan di Batipuh karena kedekatannya dengan Hayati. Sehingga akhirnya dia harus menjauhi Hayati. Bahkan lamarannya untuk menikahi Hayati ditolak oleh Keluarga Hayati dengan alasan ketidakjelasan identitas kesukuan Zainudin. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan Zainudin dan Hayati untuk menyatukan perbedaan mereka dipermasalahkan dan tidak dapat diterima oleh masyarakat.

Perbedaan Kelas Sosial

Zainudin yang merupakan pemuda dengan kondisi perekonomian melarat dan hidup menumpang pada kerabatnya di Sumatera, dapat berhubungan dengan Hayati yang

merupakan anak dari keluarga bangsawan terpendang di Batipuh. Hubungan mereka mengabaikan perbedaan kelas sosial mereka yang cukup kentara. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Zainudin dan Hayati merayakan perbedaan status sosial mereka dengan saling toleransi bahkan cenderung mengabaikan perbedaan itu. Perbedaan kelas sosial menjadi masalah dalam film ini yang ditunjukkan pada momen tertolaknya lamaran Zainudin oleh keluarga Hayati, disisi lain lamaran Azis yang diterima oleh keluarga Hayati. Penerimaan itu di-dasarkan atas anggapan bahwa Aziz adalah lelaki Minang sejati dan berasal dari keluarga terpendang. Hayati yang digambarkan sebagai sosok gadis penurut tidak melakukan perlawanan atas penjadohan ini.

Dalam konteks multikulturalisme, ikatan primordial dalam masyarakat Minang yang ditunjukkan dalam film untuk tetap mempertahankan garis keturunan ibu dalam praktik keseharian mereka pada akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan etnosentrisme, yaitu sikap menganggap cara hidup masyarakatnya adalah yang paling baik (Moeis 2008, 19). Jika dibiarkan hidup dalam keseharian masyarakat, primordialisme serta etnosentrisme, bukan tidak mungkin bisa menimbulkan konflik yang biasa disebut SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Apabila dikaitkan dengan multikulturalisme Indonesia apalagi era kontemporer, isu-isu serupa masih cukup sering dijumpai. Sebagai contoh adalah perempuan suku Jawa yang akan menikah dengan laki-laki suku Batak tidak dapat menikah begitu saja. Jika kedua pihak beserta keluarga kedua pihak telah menyetujui rencana itu, pihak Batak menginginkan prosesi secara adat untuk memberi marga pada calon mempelai perempuan sebelum menikah yang

menjadikannya bukan lagi suku Jawa. Selain itu dengan adat apa prosesi pernikahan akan dilangsungkan juga menjadi pertimbangan penting.

Menurut pandangan Kymlicka, apa yang terjadi pada Zainudin sebagai minoritas dalam masyarakat Minang dan Hayati sebagai perempuan Minang merupakan tertindasnya hak perorangan akibat hak kolektif yang dimiliki oleh kelompok. Menjadi demikian karena meskipun secara latar waktu, tahun 1930-an, Indonesia belum resmi berdaulat, tetapi momen Sumpah Pemuda dua tahun sebelumnya merupakan peristiwa bahwa semua etnis pribumi yang mendiami wilayah yang disepakati sebagai Indonesia adalah satu bangsa.

Film ini menunjukkan betapa tradisi berbalut etnosentrisme dapat melenggangkan penindasan kelompok terhadap anggotanya. Dalam kasus ini perlu adanya pengkajian terhadap politik multikulturalisme yang menurut Kymlicka berusaha melindungi hak-hak minoritas justru menimbulkan tekanan pada tingkatan internal kelompok itu sendiri. Padahal dalam multi-kulturalisme yang dikemukakan Kymlicka, “hak minoritas tidak memperbolehkan satu kelompok mendominasi kelompok lainnya; dan tidak dapat membuat satu kelompok menindas anggotanya sendiri.” (Kymlicka 2002, 295). Pembatasan internal terhadap Zainudin dan Hayati yang sebenarnya

tidak ingin mengikuti pola matrilineal dalam masyarakat Minang seharusnya tidak perlu terjadi dan bukan merupakan hal yang diinginkan oleh multikulturalisme karena politik ini akan mentoleransi dan selalu dapat dinegosiasikan sehingga tercapai kesetaraan. Dalam konteks Indonesia, multikulturalisme belum terwujud sepenuhnya karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masih hidupnya ikatan primordial yang enumbuhkan etnosentrisme. Selain itu proses negosiasi yang dilakukan cenderung menguntungkan bagi pihak-pihak yang lebih dominan.

KESIMPULAN

Berbagai perbedaan, seperti dalam film ini, perbedaan suku dan kelas sosial merupakan beberapa masalah yang menjadi pertimbangan dilangsungkannya sebuah pernikahan jika dikaitkan dengan konteks Indonesia. Padahal pernikahan merupakan ranah pribadi yang penting maknanya bagi setiap individu. Adanya kecenderungan untuk mendominasi dan mengeliminasi golongan suku dan kelas sosial tertentu membuat sulit terwujudnya kesetaraan seperti yang dicita-citakan oleh multikulturalisme. Meskipun sulit, kemungkinan untuk mewujudkannya masih ada jika masing-masing golongan mampu melepaskan primordialisme maupun etnosentrisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, H. Usmar. 1983. *Umar Ismail Mengupas Film*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kymlicka, Will. 2002. *Kewarganegaraan Multikultural: Teori Liberal Mengenai Hak-Hak Minoritas* (terjemahan: Edlina Hafmini Eddin). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Moeis, Syarif. (2008). “Perkembangan Kelompok dalam Masyarakat Multikultural”. Makalah pada diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI, Bandung.
- Powdermaker, Hortense. 1950. *Hollywood: The Dream Factory an Anthropologist Looks at the Movie Makers*. London: Secker & Warburg.
- Syaifuddin, Achmad Fedyani. (April 2006). *Membumikan Multikulturalisme di Indonesia*. Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI. Vol. II No. 1 , Hal. 3-10.
- Stark, Alexander. (2013). *The Matrilineal System of the MInangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective*. Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal. Vol 13. Hal 1-13.
- Suyanto, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Turner, Graeme. 1999. *Film as Social Practice*. London & New York: Routledge.